

Revitalisasi Peran ICMI pada Era Reformasi

Juju Saepudin

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
 Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung - Jakarta Timur
 Email : saep.17.khasep@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 3 Maret 2016, diseleksi tanggal 27 Mei 2016 dan direvisi 5 Juni 2016

Abstract

The birth and the existence of the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI) has become a phenomenon in the politics of Islam in Indonesia, especially about its existence and its influence after the collapse of the New Order era. This paper presents the results of research related to the dynamics of ICMI in the Reformation Era. With qualitative approach and descriptive analysis, it can be concluded that in the Reformation Era, ICMI has decreased its influence and its appeal because their failure in making one of the power house in the national politics prior to the fall of the New Order Era and to have the clash of political functions and religious functions resulting in the identity loss of ICMI. Therefore, it is important to revitalize ICMI role as an agent of social change, in order that ICMI can play a major role in the dynamics of political Islam and nation-building in the field of religion, social, politic, education and empowerment of civil society in Indonesia towards civil society.

Keywords: Revitalization, ICMI, Reformation Era, Madani Society.

Pendahuluan

Pasang surut hubungan pemerintah Orde Baru (Orba) terhadap dunia Islam dari yang bersikap antagonis sampai yang bersikap akomodatif telah memberi dampak pada perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Sikap pemerintah

Abstrak

Kelahiran dan keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menjadi fenomena tersendiri dalam belantika politik Islam di Indonesia, terlebih tentang eksistensi serta pengaruhnya pasca tumbanganya Orde Baru. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian terkait dinamika ICMI pada Era Reformasi. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada Era Reformasi ICMI mengalami penurunan pengaruh dan daya tarik, hal itu disebabkan karena kegagalan dalam upaya menjadikan salah satu power house dalam politik nasional menjelang tumbanganya Orde Baru disamping benturan fungsi politik dan fungsi keagamaan yang berakibat loss identity dalam tubuh ICMI. Oleh sebab itu, dirasa penting revitalisasi peran ICMI sebagai agent of social change, supaya bisa memainkan peran besar dalam dinamika politik Islam dan pembangunan bangsa di bidang agama, sosial, politik, pendidikan dan pemberdayaan civil society di Indonesia menuju masyarakat Madani.

Kata kunci: Revitalisasi, ICMI, Era Reformasi, Masyarakat Madani.

pada era 70-an hingga awal 80-an sangat mencorakan sikap antagonistik yang menyebabkan kemunduran bagi umat Islam dalam segi politik, sosial dan budaya.

Umat Islam menyadari bahwa perlawanan konfrontatif tidak akan

berhasil. Oleh sebab itu, kalangan cendekiawan muda melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama ini dielaborasi dalam corak legalitas dan formalitas. Orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada politik substantif dan integratif. Artinya pendekatan yang lebih mengutamakan kepada aspek kandungan nilai Islam sebagai sumber inspiratif bagi kekuatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara.

Memasuki tahun 1990-an, dengan berkembangnya dunia pendidikan telah membuka keran perkembangan daya fikir melalui dunia pendidikan, kesempatan pun diberikan kepada golongan baru untuk mengisi dalam pemerintahan karena banyak dari generasi muda Islam telah mengenyam pendidikan tinggi. Perubahan sikap pemerintah kepada Islam mulai terasa menjadi lebih akomodatif, peranan Islam mulai berpengaruh, di samping kekuatan ABRI dan mahasiswa dalam rangka mengeliminasi kekuatan komunis.

Menurut Effendy ada dua alasan utama orde baru merekrut kaum muslim, dalam hal ini para aktifis dan cendekiawan muslim. *Pertama*, dari sudut sosiologis terbukanya akses pada pendidikan dan aktifitas ekonomi, yang memberikan para cendekiawan banyak kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Pulangnya mereka dari menuntut ilmu disertai dengan mobilitas sosial menjadikan nilai tawar umat Islam semakin tinggi sehingga mereka harus diakomodasi ke dalam struktur negara. *Kedua*, peningkatan kualitas pendidikan umat Islam serta kemampuan cendekiawan Islam dalam melontarkan gagasan pemikiran Islam sehingga membuat pemerintah tidak mungkin mengabaikan keberadaan mereka, apalagi pemikiran-pemikiran tersebut dalam beberapa hal

sesuai dengan arah dan kebijakan politik yang dikembangkan orde baru (Bachtiar Effendi, 1998 : 37-38).

Kelahiran ICMI sebagai suatu wadah organisasi yang digagas oleh generasi baru yang lebih terdidik dikalangan umat telah berdampak pada perkembangan Islam sebagai gerakan kultural walaupun dari segi politik terdapat penurunan namun di luar politik mengalami kemajuan. Perkembangan yang lebih mencolok adalah hilangnya sekat-sekat pemisah antar ormas dengan lembaga-lembaga yang lainnya.

ICMI sebagai suatu wadah organisasi berawal dari gagasan gagasan untuk mengadakan simposium dengan tema, "Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas" yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September - 1 Oktober 1990. Mahasiswa Unibraw yang terdiri dari Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal berkeliling menemui para pembicara, di antaranya Imaduddin Abdurrahim dan M. Dawam Rahardjo. Namun kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan ada tanggal 6 Desember 1990 karena berbagai kendala. Symposium di buka oleh Presiden Soeharto dan di hadiri oleh beberapa menteri dan panglima ABRI, serta para birokrasi orde baru, peristiwa 3 hari yang bersejarah ini diikuti oleh lebih dari 500 intelektual muslim dari berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Pada hari kedua, sekitar 460 undangan dengan membubuhkan tanda tangannya pada progam pendirian sebuah perhimpunan yang baru dan memilih B.J. Habibie sebagai ketuanya (ICMI : 2015).

Secara internal, ICMI memiliki kekuatan berupa orientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai disiplin ilmu dan profesi yang juga berada di berbagai organisasi kemasyarakatan,

keagamaan Islam dan organisasi politik serta keberadaan ICMI adalah lintas wilayah, ruang dan waktu.

Tampilnya tokoh-tokoh ICMI di dalam beberapa kabinet pemerintahan telah membawa perubahan orientasi pemahaman dan kebijakan dari pendekatan makro ke pendekatan mikro. Konsep *trickle down effect* dari pertumbuhan ke kesejahteraan telah mulai dilakukan dengan percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pendekatan keberpihakan, mulai dikembangkan dan diterapkan ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang secara langsung berdampak pada masyarakat secara umum dan umat Islam pada khususnya (Kartasasmita : 2015).

Namun demikian, pasca tumbanganya orde baru keberadaan ICMI sampai saat ini masih didera berbagai masalah dan kesulitan, ICMI belum bisa berkiprah secara optimal dalam pengelolaan organisasi dan dalam pemecahan masalah bangsa, yang berdampak pada perubahan yang belum signifikan bagi kemajuan ICMI sendiri maupun bagi kemajuan umat, masyarakat dan bangsa. Hal tersebut bisa terlihat dari kondisi eksternal yang dihadapi ICMI, berupa berbagai indikator makro dalam berbagai bidang kehidupan dan juga posisi Indonesia dalam peta pembangunan bangsa-bangsa.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa di atas, ICMI perlu melakukan revitalisasi agar bisa berperan lebih aktif, berkualitas dan lebih produktif dalam mengatasi permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan, melalui pengembangan program-program yang inovatif, strategis dan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perbaikan dan peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan senantiasa dilaksanakan secara taat asas atau sesuai dengan *khittah*

perjuangan ICMI sebagai aktualisasi paradigma pembangunan peradaban yang Islami, berakhlak mulia, sejahtera dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian di atas, ulasan terkait revitalisasi peran ICMI di era reformasi menjadi penting adanya dan harus direspon positif semua pihak, karena potensi cendekiawan muslim di Indonesia dapat melahirkan banyak pemikiran brilian yang dapat membawa perubahan, pembaruan dan kemajuan bagi umat Islam dan juga Indonesia.

Kerangka Konseptual

Konsep Revitalisasi

Kata dasar dari revitalisasi yaitu “vital” artinya penting. Imbuhan “re” sebelum kata “vital” bisa diartikan sebagai proses pengulangan, dan atau sikap sadar untuk melakukan upaya atau usaha (Rahman : 2009). Jadi kata “revitalisasi” berarti upaya untuk melakukan perbaikan dari beberapa kekurangan yang ada dan diketahui sebelumnya. Perbaikan dimaksud biasanya lebih sering digunakan untuk hal-hal yang tidak nampak secara kasat mata, seperti paradigma, konsep dan yang lainnya. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya (Alwi, 2005 : 1142).

Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu perbuatan menjadi vital atau membangkitkan kembali vitalitas sehingga sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Seiring perkembangan selanjutnya, istilah revitalisasi digunakan oleh banyak kalangan dalam segala bidang, dari bidang kajian yang abstrak sampai dengan yang nampak secara kasat mata. Berbagai macam pengertian lain tentang revitalisasi dari banyak kalangan muncul sedemikian rupa yang

dimungkinkan satu sama yang lain bertentangan.

Dalam khazanah dinamika keilmuan kontemporer, hal itu wajar terjadi karena pada prinsipnya tidak akan ada definisi yang definitif. Artinya batasan pengertian terhadap suatu istilah tertentu, sulit –untuk tidak mengatakan mustahil– akan dapat menggambarkan istilah itu secara utuh dan menyeluruh. Dalam tataran aplikatif sebagaimana digunakan banyak kalangan belakangan ini, revitalisasi tidak ubahnya seperti istilah kata biasa, sama dengan kata reorganisasi, reformulasi, reinterpretasi dan yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai suatu bangunan teori tertentu yang lahir karena gejala sejarah masa lalu.

Revitalisasi sebagai bangunan sebuah teori, bisa digunakan dalam berbagai bidang kajian dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : 1) objek revitalisasi (tempat atau masalah yang akan diberdayakan) jauh dalam rentang waktu sebelumnya sudah pernah menjadi vital (sudah pernah terberdaya); 2) saat akan melakukan revitalisasi, tempat atau masalah yang menjadi objek dimaksud dalam kondisi menurun atau kurang terberdaya lagi; 3) target dilakukannya revitalisasi adalah untuk memulihkan kembali kondisi suatu tempat atau masalah, minimal sama dengan vitalitas yang pernah digapai sebelumnya, tambah bagus apabila lebih baik lagi (Rahman: 2009).

Cendekiawan Muslim

Cendekiawan muslim adalah dua kata kunci yang sarat makna dan menuntut peran nyata bagi yang menyandangnya. Kata “cendekiawan” dalam al-Quran dikenal dengan istilah *ulul albab*, yang merupakan perwujudan aktifitas akal dan hati. Kepribadian *ulul al-bab* menempati posisi penting dan

terhormat dalam al-Quran dan hanya layak bagi seorang yang berilmu dan berhikmah, sebagaimana dalam firman Allah SWT : “Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS Yusuf [12] : 22).

Antara ilmu dan hikmah ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, baik ilmu yang murni (*pure science*) maupun terapan (*applied science*) diperlukan oleh bangsa yang akan dan sedang membangun. Disamping itu, faktor penting yang sangat menentukan adalah ada tidaknya hikmah di tengah bangsa itu, terutama di kalangan pengendali dan pelaku pembangunan bangsa itu. Orang yang memiliki ilmu dan hikmah inilah yang disebut dalam al-Quran sebagai cendekiawan atau pribadi *ulul albab*.

Dalam *Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Quran* disebutkan bahwa kata *ulul albab* berulang sebanyak 16 kali dalam 10 surah dengan konteks yang berbeda-beda. Kata *ulul albab* diterjemahkan dengan “orang yang berakal”, artinya orang yang mampu mengambil kesimpulan, pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat *qauliyah* yang terdapat dalam al-Quran maupun ayat-ayat *kauniyah* yang terdapat di alam raya. *Ulul albab* adalah orang yang memiliki sikap keilmuan dengan melakukan secara teratur upaya-upaya pengamatan, penelitian, pengakajian dan penafsiran terhadap gejala-gejala alam. Dari kajian itu akan muncul kesadaran yang dalam akan kebesaran Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu keseimbangan fikir dan zikir (Irawan : 2015)

Kata kunci “muslim” menunjukkan bahwa berislamnya seseorang menuntut adanya totalitas. Karakter Islam yang *syumul* mewarnai seluruh aspek kehidupan sehingga pola fikir, emosi, perasaan dan juga fisik terwarnai dengan Islam. Dengan *syahadah*, seorang muslim meyakini dia memang diciptakan hanya

untuk beribadah kepada Allah, bahwa tidak ada yang dapat memberinya kemudharatan kecuali atas izin Allah, sehingga dengan demikian tidak ada satupun yang ditakutinya.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia telah menjadi aset umat Islam Indonesia, memenuhi kebutuhan umat Islam akan wadah yang terbuka. Kehadiran ICMI telah diakui menjadi *angle* untuk mencantolkan amal shaleh, forum untuk berkumpulnya kaum terdidik dari berbagai faham dan tingkat pemahaman serta pengalaman keagamaan dan *entry point* untuk siapa saja yang mau ke pangkuan Islam.

Era Reformasi

Reformasi berasal dari kata *reformation* dengan akar kata *reform* yang artinya “*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*” (Wibisono, 1998 : 1). Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Imawan : 1999).

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Gerakan reformasi di Indonesia, lahir sejak 21 Mei 2008 sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis sosial serta krisis kepercayaan merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.

Gerakan reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap

pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Reformasi di bagi dalam 3 bentuk : reformasi prosedural, reformasi struktural dan reformasi kultural, (Hermawan, dkk : 2015)

Pertama, Reformasi Prosedural yaitu tuntutan untuk melakukan perubahan pada tataran normatif atau aturan perundang-undangan dari yang berbentuk otoriter menuju aturan demokratis. Undang-undang yang mengatur bidang politik harus menjamin adanya ruang kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas politik. Undang-undang yang mengatur bidang sosial budaya harus memberikan kesempatan masyarakat untuk membentuk kelompok sosial sebagai ekspresi kolektif dari identitas masing-masing. Undang-undang yang mengatur bidang ekonomi harus melindungi kepentingan masyarakat umum (ekonomi kerakyatan) bukan pengusaha dan penguasa.

Secara prosedural era reformasi mengandung harapan adanya *repositioning* pola relasi antara masyarakat dan negara karena negara telah memberi kesempatan seluas mungkin kepada rakyat untuk melakukan usaha-usaha produktif guna memperkuat posisi tawarnya terhadap negara.

Kedua, Reformasi Struktural yaitu tuntutan perubahan institusional negara dari birokratik menuju birokrasi. Birokratik adalah lembaga negara yang hirarkis, sentralistik dan otoriter. Birokrasi adalah lembaga negara yang responsif, penegak keadilan, transparantif dan demokratis yang menegakkan istilah-istilah *suport system*.

Ketiga, Reformasi Kultural yaitu tuntutan untuk melakukan perubahan pola fikir, cara pandang dan budaya seluruh elemen bangsa untuk menerima

segala perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Reformasi kultural merupakan kata kunci untuk mewujudkan agenda reformasi prosedural dan struktural yang dijelaskan di atas. Tanpa adanya reformasi kultural, reformasi prosedural dan struktural hanyalah sebuah simbol yang tidak memiliki makna apa-apa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003 : 27). Data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran deskriptif terkait dinamika ICMI. Dengan analisis tersebut, melahirkan kesimpulan berupa proporsi-proporsi yang berkaitan dengan tema penelitian.

Temuan dan Pembahasan

Cikal Bakal ICMI

Embrio ICMI mulai dirintis sejak tahun 1964, di era tersebut merupakan mulai memuncaknya kekuatan orde baru yang ditandai dengan pendirian Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia)¹ dimotori oleh 100 orang sarjana Muslim yang lebih dari separuhnya adalah alumni aktifis HMI, persatuan ini didirikan di Mega Mendung Bogor, dengan pucuk kepemimpinan HM. Subchan Z.E (ketua PB. NU) dan H.M Sanusi (anggota PP Muhammadiyah). Namun persatuan ini lumpuh karena konflik internal di samping menenggalnya Sekjen Persami

¹ Sebelumnya berdiri beberapa persatuan dan ikatan kelompok non Muslim, seperti : ISKI (Ikatan Sarjana Kristen Indonesia) dan PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) pada tahun 1958.

Bintoro Tjkroamidjojo pada tahun 1974 (Anwar: 1995: 251).

Dengan lumpuhnya kekuatan tersebut, menjadi alasan persatuan cendekiawan untuk mendirikan kembali sebuah ikatan persatuan kaum intelektual muslim. Pada tanggal 26-28 Desember 1984 Majelis Ulama Indonesia dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dari berbagai Perguruan Tinggi menyelenggarakan sebuah pertemuan pertama di Cibogo, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan: 1) pembentukan beberapa tim konsultasi cendekiawan muslim baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka membantu MUI dan lembaga keagamaan; 2) pembentukan berbagai lembaga kajian di bidang pendidikan, masalah agama dan kemasyarakatan, zakat dan lembaga keuangan, agama dan adat istiadat, teknologi dan pengembangan masyarakat serta etika dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pertemuan tersebut di atas kemudian disusul dengan kegiatan lokakarya yang diadakan di Ciawi-Bogor pada tanggal 8-9 Maret 1986, dilanjutkan dengan pertemuan Cibogo pada 7-8 Mei 1986, yang menghasilkan Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI). Dalam pertemuan ini muncul keinginan untuk membentuk suatu wadah bagi cendekiawan muslim, namun tidak terealisasi karena masih adanya anggapan forum tersebut belum diperlukan. Pada tanggal 25-27 Juli 1986, diadakan lokakarya yang dimotori oleh FKPI, namun pertemuan ini tidak juga memformalkan ikatan cendekiawan muslim sebagai wadah resmi karena masih adanya keraguan akan persetujuan pemerintah.

Dalam sekup yang tidak formal, pada tahun 1989 M. Imadudin Abdurrahim seorang cendekiawan yang merupakan tokoh Masjid Salman ITB Bandung, mengumpulkan sekitar

50 orang cendekiawan muslim, namun setelah wadah terbentuk resmi langsung dibubarkan kepolisian. Dari sekian banyak usaha yang diupayakan tercermin tidak mudahnya membentuk wadah cendekiawan muslim.

Pada bulan Februari 1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang terjadi diskusi kecil sekelompok mahasiswa yang merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama karena "berserakannya" keadaan cendekiawan muslim, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri, serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing.

Forum itu kemudian memunculkan gagasan untuk mengadakan simposium dengan tema, "Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas" yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September - 1 Oktober 1990. Mahasiswa Unibraw yang terdiri dari Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal berkeliling menemui para pembicara, di antaranya Imaduddin Abdurrahim dan M. Dawam Rahardjo (ICMI : 2015).

Dari hasil pertemuan tersebut pemikiran mereka terus berkembang sampai muncul ide untuk membentuk wadah cendekiawan muslim yang berlingkup nasional. Kemudian para mahasiswa tersebut dengan diantar Imaduddin Abdurrahim, M. Dawam Rahardjo dan Syafi'i Anwar menghadap Menristek Prof. B.J. Habibie dan meminta beliau untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional.

Pada tanggal 6 Desember 1990, simposium dibuka oleh Soeharto dan dihadiri oleh beberapa menteri dan panglima ABRI, serta para birokrasi orde baru, peristiwa 3 hari yang bersejarah

ini diikuti oleh lebih dari 500 intelektual muslim dari berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Pada hari kedua, sekitar 460 undangan dengan membubuhkan tanda tangannya pada program pendirian sebuah perhimpunan yang baru dan memilih B.J. Habibie sebagai ketuanya, namun perhimpunan sebelumnya di usulkan diganti nama dari "Ikatan Sarjana Muslim Indonesia" menjadi "Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia", dengan demikian keanggotaan perhimpunan tersebut menjadi terbuka bagi konstituen yang lebih luas dan cakupan aktivitasnya melampaui batas-batas akademis (<http://mudakarya75.blogspot.com/2011/12/moch-rifan->, di unduh pada tanggal 10 Desember 2014).

Tanggal 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia di era orde baru, secara resmi ICMI dibentuk di Malang. Saat itu juga secara aklamasi disetujui kepemimpinan tunggal dan terpilih Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang pertama. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan berdirinya ICMI tidak berarti kita hanya memperhatikan umat Islam, tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia, karena itu juga merupakan tugas utama.

Visi-Misi dan Program ICMI

Visi dan misi ICMI sebagai organisasi cendekiawan berorientasi pada pelaksanaan program-program kekeayaan dalam pemberdayaan umat yang didukung oleh pemikiran kecendekiawanan dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin di segala bidang kehidupan untuk mencapai kualitas iman dan taqwa, kualitas fikir, kualitas karya, kualitas kerja dan kualitas hidup.

Dalam menghadapi berbagai tantangan internal keorganisasian dan eksternal kebangsaan, ICMI mengembangkan visi “Menjadi organisasi cendekiawan yang mendorong terwujudnya kekuatan imtaq dan iptek umat bagi terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut ICMI mengembangkan misi: 1) meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan melalui pembinaan akhlakul karimah; 2) meningkatkan kualitas fikir melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pendidikan; 3) meningkatkan kualitas karya dan kerja melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pelatihan; 4) meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan kegiatan sosial dan ekonomi umat, kesehatan serta karya dan kinerja litbang yang berkualitas dan; 5) mampu meningkatkan kualitas keluarga dan keturunan melalui pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. (<https://id-id.facebook.com/notes/icmi-ikatan-cendekiawan-muslim-seindonesia/garis-besar-program-kerja-icmi>, diunduh 11 desember 2014).

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi ICMI tersebut dikembangkan program kerja yang difokuskan pada perubahan pada faktor “A” diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, institusi dan teknologi, dan faktor “B” yang diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sistem dan proses ekonomi, politik dan sosial sehingga dapat melangsungkan pengelolaan berbagai kegiatan secara lebih baik, beretika dan bertanggung jawab serta menghasilkan kinerja yang lebih baik, produktif dan berkeadilan serta revitalisasi ICMI yang dijabarkan ke dalam 11 pokok kegiatan yang meliputi kegiatan: revitalisasi organisasi, kaderisasi anggota, pengembangan usaha (secara mandiri dan melalui kemitraan, termasuk pengembangan lembaga keuangan mikro dan makro), penelitian

dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, publikasi, asistensi, advokasi dan fasilitasi.

Program dan kegiatan yang telah disepakati dilaksanakan dengan menempuh pendekatan: fungsionalisasi dan fasilitasi, institusionalisasi, desiminasi, integrasi jaringan dan mobilisasi; dalam bentuk kajian kebijakan, pelembagaan, pengembangan jaringan dan kegiatan langsung yang dapat dilaksanakan secara mandiri, kemitraan, melalui *batom* atau *sub-batom* dan bentuk kelembagaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan AD dan ART ICMI.

Pelaksanaan program ICMI diupayakan berbasis pada masjid dengan berbagai bentuk atau pola sehingga fungsi masjid dapat dioptimalkan untuk membangun masyarakat madani. Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang memenuhi lima kriteria kualitas, sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak, moral, etika dan supermasi hukum sebagai resonansi dari kualitas iman dan taqwa. *Kedua*, masyarakat yang mampu berfikir logis (rasional), sistematis, dan konsisten sebagai resonansi dari kualitas fikir, sehingga di samping mampu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan (alam dan sosial) dan teknologi yang berdaya saing tinggi, juga mampu menghargai perbedaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kritis dan demokratis. *Ketiga*, masyarakat yang mampu berkarya dan bekerja secara profesional, efisien, dan produktif berlandaskan pada metode, tehnik dan cara yang inovatif. *Keempat*, masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sejahtera dengan memenuhi berbagai persyaratannya, seperti: kesempatan kerja, pendapatan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. *Kelima*, masyarakat dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta berketurunan yang berkualitas.

Dinamika ICMI Era Reformasi

Dalam sejarah Islam Indonesia terdapat polarisasi umat Islam yang amat kaya. Sejak masuknya Islam ke Indonesia² sampai zaman pra-kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang dipresentasikan oleh organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi politik (orpol). Oleh para pengamat Islam, keanekaragaman ini diidentifikasi dengan memakai berbagai nama atau label.

ICMI adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah dialog intelektual bagi para cendekiawan muslim Indonesia yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman tanpa melihat aliran warna politik dari kelompok mereka (Ensiklopedi Islam, 1993 : 186). Ketika ICMI dilahirkan di Malang, banyak kalangan ketika itu menilai konstalasi peta politik berubah, meskipun ICMI bukan sebuah partai politik, tapi individu-individu di dalamnya banyak dikenal ketokohnya seperti Imanuddin Abdurrahim, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid, Dawam Raharjo dan tokoh lainnya. Awal pembentukan ICMI membuat rezim pada masa itu khawatir akan pengaruhnya, namun posisi Habibie ketika itu menjadi jaminan bahwa ICMI tidak akan bermain api dengan penguasa ketika itu, yaitu Presiden Soeharto.

Sebagai wadah cendekiawan muslim yang lahir dari perjalanan

² Para sejarawan dalam seminar *Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia*, yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 dan dikuatkan dengan seminar yang sama di Banda Aceh pada tahun 1978, sepakat bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia pada abad VII dibawa langsung dari Mekah-Arab Saudi. Seminar tersebut tiga butir kesepakatan, yaitu (1) Ajaran Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad I Hijriah atau abad VII Masehi. (2) Ajaran Islam masuk ke Indonesia tidak melalui India, tetapi langsung dari Mekah-Arab Saudi. (3) Madzhab Syafi'i adalah madzhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Hasil seminar tersebut dengan tegas membantah pendapat yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad VIII oleh pedagang Gujarat dari India. Materi dasar Nahdlatul Ulama Ahlussunnah Waljamaah ; *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, (Semarang : PW. LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002), h.33

panjang ICMI difeodalisasi dalam sebuah hirarki pendidikan yang formalistik meskipun tidak sepenuhnya terjadi, sehingga menjadi hegemoni yang tidak lagi egaliter. Posisi cendekiawan muslim, digradasi dalam sebuah badan-badan otonom untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan tujuan organisasi, di antaranya : Orbit (Orang Tua Bimbingan Terpadu), Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Masika (Majelis Sinergi Kalam), MKPD (Majelis Kajian Pembangunan Daerah), Cides (*Centre for Information and Development Studies*), LPBH (Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum), Mupakat (Majelis Usaha Pelayanan Kesehatan), BUMI (Bina Usaha Mandiri Indonesia), Iiftihar (*International Islamic Forum Science, Technology and Human Resources Development*).

ICMI sebagai organisasi kemasyarakatan yang bercirikan kebudayaan sebagaimana yang terumuskan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini tidak mempunyai tujuan politik. Berdirinya ICMI tidak dilatarbelakangi oleh politik, melainkan didorong oleh kesadaran budaya kaum cendekiawan muslim untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan bangsa. Meskipun sudah dinobatkan sebagai gerakan sosial-kebudayaan, tetapi lebih sering dilihat dengan kacamata politik.

Hal itu disebabkan karena banyak kader-kader ICMI yang terlibat kegiatan politik praktis. Walaupun dalam melakukan aktivitas politiknya tidak membawa dan mengenakan "baju" organisasi atau tidak secara langsung, tetapi oleh sebagian kalangan dianggap sebagai "sepak terjang dan track-record" politik ICMI. Anggapan-anggapan ini semakin terlihat pada figur Ketua Umum ICMI BJ Habibie sebagai motor penggerak kegiatan ICMI. Sehingga langkah yang diayunkannya

selalu membawa dampak kepada ICMI, atau setidaknya nama ICMI selalu terbawa (Makmur dan Mashad, 1996 : 61). Misalnya, berhasil memasukan kader-kader ICMI dalam DPR/MPR, kabinet dan kepengurusan Golkar, yang oleh para pengamat politik dinilai sebagai peng-*ijo royo-royo*-an dari senayan hingga Kabinet Reformasi. Menurut William R. Liddle, seorang pakar ilmu politik kenamaan sekaligus guru besar asal Ohio State University Amerika Serikat, di tubuh ICMI terdapat unsur primordial di dalamnya yang berasal dari kaum yang sama, hampir semua orang yang bergabung di dalam ICMI berasal dari tradisi tersebut. ICMI primordial dalam arti agama Islam menyuruh para pemeluknya untuk bekerja keras, membuat prestasi, mengejar *achievement* (pencapaian) demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. (Rais, 1999 : 88)

Spiritualisme dan kerja nyata cendekiawan muslim telah mengantarkan ICMI sebagai sebuah organisasi maha penting, sarana kepentingan umat Islam. Namun, sejak tumbangnya orde baru "spiritualitas" gagasan ICMI semakin tidak relevan hingga bahkan tidak terasa signifikan karena peran formalistik dari sebuah gelombang besar spiritual para intelektual yang memiliki kepekaan komitmen terhadap perubahan seolah terabaikan.

Dengan demikian, terkesan gelombang besar itu tidak saja menjatuhkan segala benteng ideologis orde baru, tetapi menjadi sebuah awal dari tsunami bagi organisasi ICMI yang terlibat sangat sentral dalam masa-masa akhir orde baru. Puncak dari tsunami itu adalah penolakan laporan pertanggung jawaban presiden B.J. Habibie dalam sidang MPR/DPR.

Para pengamat politik pada umumnya sepakat bahwa ICMI pasca reformasi telah mengalami penurunan pengaruh dan daya tarik, setelah ia

mengalami kegagalan dalam upaya menjadi salah satu *powerhouse* dalam politik nasional menjelang tumbangnya orde baru. Sejarah pembentukan dan perkembangan ormas Islam yang satu ini memang tak mungkin lepas dari sebuah rekayasa politik dari gabungan dua kekuatan: sebagian elite rezim orde baru (yang direpresentasikan oleh mantan Presiden ke III, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie) dan kelompok cendekiawan Muslim (seperti Adi Sasono, Dawam Rahardjo, dan Nurcholish Majid untuk menyebut beberapa nama paling beken di dalamnya). Dalam tempo yang teramat singkat, ICMI telah menjadi salah satu pemain utama dalam perebutan kekuasaan antar fraksi-fraksi elite orba pada awal dan pertengahan 1990-an, dan menjadi rival paling kuat bagi kelompok militer dan kaum "sekuler" serta non Muslim yang juga saling berebut pengaruh dan beraliansi (Hikam : 2014)

Pergerakan reformasi yang dicetuskan pada tahun 1998 telah mengubah hampir seluruh aspek dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sistem politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, bahkan hukum mengalami perubahan secara struktural. Dengan perubahan tersebut, mulai mencuat berbagai harapan untuk memajukan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh para *founding fathers* dalam Mukadimah UUD 1945. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, aktivitas reformasi tersebut diwarnai oleh berbagai situasi yang menimbulkan sedikit problem internal di berbagai gerakan, termasuk ICMI. Suksesi kepemimpinan nasional yang terjadi beberapa kali mengakibatkan adanya pergeseran visi pergerakan. Para pejuang reformasi menjadi kurang kritis dalam menangkap gejala perubahan, sehingga menyebabkan reformasi terbawa arus yang dapat mengubah visi awal reformasi.

Ketika era reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1998 membuat banyak tokoh turun untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik, dengan tujuan dapat memperoleh kekuasaan. Reformasi bergulir dengan cepat, Soeharto turun, Dwifungsi ABRI dicabut, UUD 1945 diamandemen. Perubahan ini berjalan demikian cepat, sementara itu ICMI seperti kendaraan kosong.

Hiruk pikuk reformasi, disikapi dengan berbagai kepentingan-kepentingan jangka pendek bagaimana bisa menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, atau anggota dewan. Meskipun demikian ruh kecendekiawanan para tokoh dan mahasiswa Islam masih hidup. Meskipun geliatnya secara politis tidak bergemadenganlincahdikancahnasional, hal ini kuat terlihat setelah Habibie tidak lagi memimpin ICMI. Terasa ada sesuatu semangat yang hilang ketika itu, mungkin "icon" imtaq dan iptek melekat pada figur Habibie. Akhirnya, realitas perjalanan ICMI dan geraknya pada muktamar ke IV di Makasar belum melahirkan hasil-hasil yang dipandang dan dirasakan langsung oleh umat. Orang-orang "tua" di ICMI pasca muktamar tidak terlihat geliatnya, terlebih-lebih diberbagai wilayah dan daerah.

Pentingnya revitalisasi peran ICMI dalam meneruskan cita-cita reformasi, karena ICMI menyimpan potensi besar sebagai aset masa depan. Sebagai bagian dari intelektual muslim, ICMI memiliki semangat yang masih berkobar-kobar, berpadu dengan idealisme dan fikiran yang kritis. Selain itu, para tokoh ICMI juga memiliki jiwa intelektualitas sebagai bagian dari dunia pendidikan yang dapat mendorong semangat menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

Keunggulan-keunggulan tersebut jika dioptimalkan akan menghasilkan *output* cemerlang yang kaya akan gagasan dan ide-ide brilian. Karena ICMI memiliki dua fungsi sebagai modal perjuangan,

yaitu fungsi politik dan fungsi keagamaan (Tebba, 1993 : 91) Secara tidak langsung ICMI memainkan peran tersebut karena selain bergerak di bidang keagamaan juga bergerak di bidang politik, hal ini dapat dilihat dari lolosnya berbagai program dalam mengembangkan Islam, sampai akhirnya segi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat dapat lebih maju.

Reformasi pada esensinya tidak menjangkau hal-hal yang bersifat fundamental. Reformasi lebih memusatkan perubahan pada hal-hal yang bersifat struktural (ada pada sistem lama), dan tidak mengubah hal-hal mendasar. Para pendukung reformasi berpendapat bahwa kegagalan tidak berada pada dasar pemikiran, tetapi pada sistem sosial tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan pada sistem tanpa mengubah dasar dari sistem tersebut. Salah satu contoh nyata adalah Indonesia, yang melakukan reformasi pada tahun 1998. Buktinya adalah tidak adanya perubahan pada Pancasila sebagai dasar negara dan Mukadimah UUD '45. Selain itu, *basic structure* dari elemen kenegaraan juga tidak diubah, hanya fungsi dan peranan yang ditinjau ulang.

ICMI di era reformasi memang menghadapi sebuah dilema dalam berinteraksi di masyarakat, di satu sisi ICMI sebagai wadah intelektual muslim yang tidak memiliki keberpihakan kepada organisasi politik tertentu. Di sisi lain, tokoh-tokoh ICMI banyak yang terlibat dalam politik praktis yang berbeda. Benturan ini mengakibatkan ICMI di era reformasi sekarang ini mengalami sedikit *loss identity*, sehingga berimplikasi pada ketidakhadiran peranan ICMI itu sendiri, baik dalam konteks sebagai politik ilmu atau dalam konteks agama (dakwah) sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini jelas merupakan kemunduran, mengingat dulu ICMI dapat mengambil bagian sebagai *agent of social change* dari masyarakat dengan menempatkan diri sebagai garda terdepan.

Penutup

ICMI telah menjadi aset umat Islam Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan wadah yang terbuka. Kehadirannya telah menjadi *angle* forum berkumpulnya intelektual muslim dari berbagai faham dan tingkat pemahaman serta pengalaman keagamaan, sehingga menjadi *entry point* bagi Islam.

Pembentukan ICMI merupakan tonggak terpenting dalam hubungan akomodatif antara Islam dan negara, karena dalam organisasi ini bertemu para tokoh Islam yang ada dalam birokrasi dengan tokoh Islam yang ada di luar birokrasi. ICMI telah menunjukkan eksistensinya di pentas sejarah perpolitikan nasional, bahkan B.J. Habibie menjadi pemain utama di dalam menentukan kebijakan pada era orde baru.

Dalam perkembangannya, ketika reformasi bergulir ICMI terjebak oleh logika kekuasaan di dalam merespon persoalan keumatan. Hal itu dapat dilihat ketidakberdayaan ICMI setelah mengalami kegagalan dalam upaya menjadi salah satu *powerhouse* dalam politik nasional serta benturan fungsi dalam tubuh ICMI yang berakibat *loss identity* dan berimplikasi pada ketidakhadiran peranan ICMI itu sendiri, baik dalam konteks sebagai politik ilmu atau dalam konteks agama.

Agenda dan cita-cita reformasi dalam membangun bangsa adalah perjalanan yang panjang. Bahkan bisa disebut sebagai sebuah *never ending journey* bagi yang mencintai negeri dan para patriot bangsa. Sementara tantangan yang menghadang bangsa, dan juga ICMI sebagai organisasi masa selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. ICMI telah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara. ICMI berperan penting dalam menjadikan kalangan intelek sebagai bagian dari

gerakan modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberadaan ICMI tidak bisa disangkal ikut memainkan peran politik umat Islam. Akan tetapi di era reformasi ini peran itu makin menyurut, karena sudah banyak partai Islam yang tampil memperjuangkan kepentingan umat Islam. ICMI di era reformasi sekarang ini adalah sebagai perekat internal umat Islam Indonesia. ICMI sebaiknya tetap tampil sebagai gerakan kultural dengan tidak meninggalkan wacana politik. Ini tidak berarti bahwa ICMI lantas a-politik, tetapi politik yang dikembangkannya adalah politik alokatif. Melalui peran seperti itu, ICMI diharapkan akan mampu mewujudkan integrasi politik dan sosial kultural antara Islam dan negara.

Sejarah telah menunjukkan bahwa ICMI sebagai faktor pemersatu bangsa. Disini pentingnya revitalisasi peran ICMI dalam memperkuat komitmen kebangsaan melalui penguatan Islam *washatiyyah*, Islam yang memberikan keteduhan, di tengah gejala meningkatnya pemikiran dan gerakan Islam transnasional yang terkadang melahirkan gerakan Islam sempalan, ICMI bersama ormas-ormas Islam lainnya harus menjadi kekuatan baru sekaligus darah segar kebangkitan umat di saat bangsa ini mengalami sejumlah permasalahan dengan terus memperkuat Islam *washaton*. Islam yang *rahmatan lil 'alamien*.

Ucapan Terimakasih

Pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, MA (Anggota ICMI Pusat) yang telah memberikan catatan penting dan pembenahan dalam berbagai aspek untuk penyempurnaan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Saudara Sasmita, SIP (Penjaga

Perpustakaan Balitbang Agama Jakarta) yang telah membantu menelusuri dan mencari buku-buku yang bertemakan ICMI sebagai sumber referensi. Tak lupa penulis haturkan terima kasih

kepada redaktur Jurnal Harmoni yang telah memberikan masukan, saran dan membantu secara teknis dalam penyempurnaan tulisan hasil ini serta bersedia menerbitkan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya*. Madinah : Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd. Tt.
- Alwi, Hasan. Et. al (ed). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Hermawan, Dany Cahyo, dkk. *Kebebasan di Era reformasi*, [diunduh pada tanggal 10 Juni 2015] dari http://www.academia.edu/6206893/KEBEBASAN_DI_ERA_REFORMASI.
- Hikam, Muhammad AS. *ICMI Pasca Reformasi : Kekuatan Civil Society atau Inkubator Islam Politik di Indonesia* [diunduh pada tanggal 12 Juni 2015] dari <http://www.mashikam.com/2010/12/icmi-paska-reformasi-kekuatan-civil>.
- <https://id-id.facebook.com/notes/icmi-ikatan-cendekiawan-muslim-se-indonesia/garis-besar-program-kerja-icmi>, diunduh pada tanggal 11 desember 2014.
- <http://mudakarya75.blogspot.com/2011/12/moch-rifan->, di unduh pada tanggal 10 Desember 2014.
- ICMI. [diunduh pada tanggal 4 Juni 2015], dari <http://illsionst.blogspot.co.id/2011/05/icmi.html>
- Imawan, Riswanda. "Makna Reformasi : Salah Kaprah", *Kedaulatan Rakyat*. 22 Juni, 1999.
- Irawan, Ade Didik. *Menyongsong Kebangkitan Cendekiawan Muslim Muda* [diunduh pada tanggal 10 Juni 2015] dari <http://adedidikirawan.blogspot.com>
- Kartasmita, Ginanjar. *Revitalisasi Cendekia*, [diunduh pada tanggal 4 Juni 2014], dari <http://koran.republika.co.id/>.
- Makmur A. Makka dan Dharorudin Mashad. *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1996.
- Materi Dasar Nahdlatul Ulama Ahlussunnah Waljamaah. *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, Semarang : PW. LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahma, Yudik Ainur. *Revitalisasi Pendidikan Pesantren (Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007)*, [diunduh pada tanggal 10 Juni 2015] dari, <http://revitalisasi-pendidikan-pesantren.blogspot.com>.

Rais, M. Amin. *Sikap Kami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1999.

Dhuafa, Jakarta : Amanah Putra Nusantara, 1995.

Tebba, Sudirman. *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.

Wibisono, Koento. *Pancasila dalam Persepektif Gerakan Reformasi: Aspek Sosial Budaya*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1998.